

DENPASAR,PERSOALAN DAN DINAMIKANYA

OLEH

I NYOMAN MARDIKA

Denpasar sebagai pusat kota dan pusat pemerintahan Provinsi Bali, saat ini bukan semata pusat kota administrasi, tapi sudah merupakan kota metropolitan. Jumlah penduduk Denpasar berdasarkan data statistik tahun 2023 sekitar 748,4 ribu jiwa dengan luas 125,9 kilometer persegi. Berdasarkan data ini kepadatan penduduk Denpasar cukup tinggi sehingga memicu masifnya alih fungsi lahan.

Penduduk Kota Denpasar mayoritas Suku Bali bergama Hindu. Sejumlah suku lainnya dengan agama berbed-beda juga menjadi penghuninya yang menunjukkan tingginya tingkat toleransi di Denpasar. Dengan Visi “Vasudewa Kutumbakam” yang berarti “kita semua bersaudara”, telah berhasil menjadi panduan bagi masyarakat untuk menjunjung tinggi kebhinekaan sehingga terwujud kehidupan yang aman, damai dan tenteram di tengah perbedaan.

Masalah yang menjadi perhatian publik Kota Denpasar adalah tata kota yang masih belum tertata dengan baik dikarenakan penegakan hukum yang lemah sehingga banyak pelanggaran, seperti diabaikan sepadan sungai dan sepadan pantai, serta jalur hijau penuh dengan bangunan yang tidak sesuai peruntukkannya. Penataan kota yang kurang akibat diabaikannya soal carrying capacity yang dipicu beberapa faktor.

Pertama, migrasi penduduk yang datang ke Denpasar tidak seimbang dengan yang keluar, terlebih lagi kemudahan administrasi kependudukan melalui UU Nomor 23 Tahun 2006, perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, adanya kemudahan membangun hanya melalui OSS (Online Single Submission) membuat banyak orang datang dan berinvestasi serta membangun di Denpasar. Dua hal ini menjadikan Denpasar yang termasuk Kota kunjungan internasional, menjadi target pencari kerja, dan investasi.

Jalan keluar atas persoalan tata ruang yang masih semrawut ini adalah proses penegakkan hukum yang tegas, dan berkeadilan. Hanya saja, biasanya penyelenggara pemeritahan Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali ragu dalam peneggakkan hukum apabila ada pelibatan pemilik modal besar.

Persoalan Kemacetan, Sampah, dan Kriminalitas

Sebagai Kota Metropolitan, Kota Denpasar dihadapkan pada kemacetan lalu lintas yang berkelanjutan. Sejumlah hal jadi penyebab, yakni pertambahan penduduk, dan tata kelola pembangunan yang tidak terkendali, jumlah kendaraan bermotor yang tidak berbanding dengan ruas jalan dan mudahnya izin pusat-pusat perdagangan. Kemacetan lalu lintas dan minimnya ruang terbuka hijau, sebagai dampak pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali mengurangi rasa nyaman warga kota Denpasar. Warga mengalami kebisingan dan polusi udara. Walikota Denpasar beserta jajaran pemerintah Kota Denpasar sesungguhnya sudah menyadari persoalan kemacetan lalu lintas. Namun untuk solusinya perlu dukungan instansi terkait, dukungan dan kesadaran warga untuk berlalu lintas dengan baik, dan memanfaatkan sarana yang ada, seperti tempat penyeberangan dan rambu-rambu yang ada. Disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar, harus berani melakukan moratorium pembangunan mall-Mall atau pusat perdagangan baru, sambil menata kota yang sesuai dengan kondisi ruang dan sosiologi masyarakat Kota Denpasar.

Saat ini Bali dan khususnya Denpasar sedang mengalami darurat sampah, karena sampai saat ini sampah belum mampu tertanggulangi secara optimal. Denpasar menghasilkan 850 ton sampah per hari dan hanya 22 persen yang dikelola di sumbernya. Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar telah menerbitkan berbagai regulasi dalam bentuk peraturan gubernur, perda Kota Denpasar, Peraturan Walikota Denpasar, bahkan saat ini Gubernur Bali mengeluarkan berbagai Surat Edaran dalam rangka meminimalisasi sampah plastic. Persoalannya acap kali regulasi tersebut hanya macan kertas, minim eksekusi dan minim implementasi, serta jarang ada evaluasi, karena penerbitan regulasi hanya seremonial dan gebyar.

Kebijakan publik harusnya ada persiapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang terukur, agar dapat diketahui publik tingkat capaian keberhasilan atau kegagalan. Kritik publik Bali soal masalah sampah terakumulasi dalam regulasi yang hanya simbol pencitraan. Seolah-olah terbitnya regulasi sudah menyelesaikan penanggulangan sampah, tanpa pernah terjun kebawah. Sebagai contoh, ketika ada pertemuan internasional di Bali, biasanya TPA Suwung diperintahkan untuk ditutup, sehingga sampah organik dan anorganik tertumpuk di TPS Sementara, dan di sudut-sudut kota.

Komunitas peduli sampah sudah bergerak membantu cara menanggulangi sampah. Hanya saja masih banyak masyarakat yang belum

peduli dan mencoba mengelola sampah di sumber. Hulu yang berarti sumber bukan berarti hanya pada rumah tangga, tapi para perusahaan produsen sampah plastik yang rata-rata merupakan perusahaan bermodal besar. Perusahaan-perusahaan besar ini belum tersentuh langsung regulasi pengurangan sampah plastik, meski diakui mereka telah memberikan CSR. Saat ini memang ada sikap ambigu dari pemerintah terhadap produsen-produsen barang berbahan plastik multi nasional. Sebaiknya perusahaan besar multinasional penghasil produk menggunakan kemasan plastik ini juga diminta pertanggungjawab dalam mengatasi masalah sampah plastik.

Yang perlu diingat soal masalah sampah adalah penggunaan teknologi modern. Hal ini belum dilakukan di Denpasar. Sedangkan, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, Denpasar tidak hanya menerima bonus demografi, tapi juga bonus penumpukan sampah.

Sebagai kota metropolis, Denpasar tidak terlepas dari persoalan kriminalitas, diantaranya adalah munculnya para begal di beberapa ruas jalan mulai malam sampai dengan dini hari. Belum lagi masalah pencurian, serta peredaran narkoba. Maraknya kriminalitas, dan kasus-kasus kamtibmas harus segera ditanggulangi. Persoalan kamtibmas tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat keamanan, tapi juga optimalisasi peran serta pemerintah daerah serta dukungan masyarakat dalam menjaga kamtibmas dilingkungan masing-masing, sehingga warga kota merasa aman dan nyaman, tinggal di Kota Denpasar.

Dari berbagai persoalan dan dinamika di Denpasar tersebut, maka penyelenggara pemerintahan dan masyarakat kota mesti bisa saling bersinergi dalam menyelesaikan persoalan. Kritik masyarakat kepada pemerintah adalah bagian dari dinamika masyarakat kota. Slogan “Denpasar Kotaku, Rumahku” bisa terselenggara dengan baik. (*)